



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK

JL. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax.- KODE POS 23242

BERITA ACARA

REVIU RENCANA STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2023-2026

NOMOR: 065 /120 / 2025

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan februari tahun dua ribu dua puluh lima (17-2-2025), kami Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Nomor : 065/ 119 /SK/2025 serta berdasarkan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah melaksanakan Reviu Renstra dan IKU Diskominfotik Kota Banda Aceh periode 2023-2026 dengan rincian sebagai berikut :

I. TUJUAN

A. Uraian Tujuan Sebelum Reviu

Tujuan
Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh

B. Uraian Tujuan Setelah Reviu

Tetap / Masih sesuai

II. SASARAN

A. Uraian Sasaran Sebelum Reviu

Tujuan	Sasaran
Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi
	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik

B. Uraian Sasaran Setelah Reviu

Tetap / Masih sesuai

III. PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

A. Program dan Indikator Kinerja Program Sebelum Reviu

Program	Indikator Kinerja Program
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada masyarakat
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya database statistik sektoral daerah
Program Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

B. Program dan Indikator Kinerja Program setelah reviu

Tetap / Masih sesuai

IV. KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

A. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sebelum Reviu

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	Persentase domain jaring komunikasi yang dikelola
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan e-government yang dikelola
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan

B. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Setelah Reviu

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan e-government yang dikelola
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan

V. SUBKEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN

A. Sub kegiatan dan Indikator Kinerja Sub kegiatan Sebelum Reviu

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik
Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasiakan Informasi Program atau Kebijakan
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi

B. Sub kegiatan dan Indikator Kinerja Sub kegiatan Setelah Reviu

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
Relasi Media	Jumlah Aktivitas Relasi Media kepada Media yang Memenuhi Kriteria Sebagai Berikut : 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam Kegiatan Relasi Media
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminaskan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundangan
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Rekomendasi Komunikasi Terhadap Isu Publik yang Berkembang dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang Dikelola maupun Pemanfaat Media Berbayar Sesuai Kriteria/Juknis
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang Disusun
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang Difasilitasi Mengikuti Bimtek/Pelatihan
Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda
Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah Data dan Informasi yang Dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi Khusus yang Dibangun dan/atau Dikembangkan Sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE
Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Statistik

Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Percentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi

VI. INDIKATOR KINERJA SASARAN

A. Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Reviu

TUJUAN/SASARA N	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KRITERIA PENILAIAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan : 1. Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	Persentase data dan informasi Kota Banda Aceh yang berkualitas dan terintegrasi		-	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Laporan Tahunan
Sasaran : 1.1 Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terupdate dan tepat waktu	1.1.1 Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	25%	27%	29%	31%	33%	33%	BIDANG STATISTIK	Laporan Tahunan
	1.1.2 Persentase website OPD yang aktif	$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	80%	82%	84%	86%	88%	88%	BIDANG PIP / SMART CITY	Laporan Bulanan dan Tahunan
1.2 Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1.1.3 Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	55%	57%	59%	61%	63%	63%	BIDANG E-GOV / BIDANG SMART CITY	Laporan Triwulan dan Tahunan

B. Indikator Kinerja Sasaran setelah Reviu

Tetap / Masih sesuai

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH



Alizar, S.Ag.,M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 19691117 200112 1 002



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK

JL. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax.- KODE POS 23242

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH

NOMOR: 065 / 19 / SK / 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA), INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023-2026 DAN DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2023 No. 710/141/IBA-LHE/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh, dokumen perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memerlukan penyesuaian atau reviu;
 - c. bahwa untuk menyesuaikan dan memfokuskan strategi dan capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c maka perlu ditetapkan sebuah Keputusan mengenai penunjukan tim Reviu Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh 2007-2027;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, dan
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- KESATU : Menunjuk personil yang namanya terlampir untuk melakukan reviu terhadap dokumen Renstra, IKU Tahun 2023–2026 dan Dokumen Pendukung SAKIP Pada Diskominfotik Kota Banda Tahun 2025;
- KEDUA : Personil yang melakukan reviu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempelajari rencana pembangunan daerah (RPD) Kota Banda Aceh tahun 2023-2026;
 - b. mempelajari Renstra, IKU, indikator sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, serta dokumen pendukung SAKIP lainnya seperti rencana aksi, perjanjian kinerja, rencana kerja, dan dokumen perencanaan dan evaluasi lainnya;
 - c. menyusun revisi dokumen Renstra, IKU Tahun 2023–2026 dan dokumen pendukung SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Tahun 2025;
 - d. menyusun berita acara reviu dokumen Renstra, IKU Tahun 2023–2026 dan Dokumen pendukung SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Tahun 2025;
- KETIGA : Personil yang melakukan reviu terhadap dokumen Renstra dan IKU Tahun 2023–2026 dan Dokumen Pendukung SAKIP Pada Diskominfotik Kota Banda Tahun 2025 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Diskominfotik Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 17 Februari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH



Alizar, S.Ag.,M.Hum
Pembina Utama Muda /
NIP. 19691117 200112 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
NOMOR : 065 / 19 /SK/2025
TANGGAL : 17 Februari 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA),
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023-2026 DAN DOKUMEN
PENDUKUNG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PEMERINTAH
(SAKIP) PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA
BANDA ACEH TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Alizar, S.Ag.,M.Hum	Kepala Dinas	Koordinator
2	Ir. Muhammad Zubir, S.SiT.,M.Si	Sekretaris	Ketua
3	Rahadian, ST	Kepala Bidang PIP	Anggota
4	Asna Mardhia, S.STP	Kepala Bidang E-Government	Anggota
5	Nourchalis, SE	Kepala Bidang Layanan Hubmed & Smart City	Anggota
6	Jauhari, S.Sos	Kabid Statistik	Anggota
7	Husni Hamid, SE.,M.Si	Perencana Ahli Muda	Anggota
8	Yudhi Aris Munandar, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH



Alizar, S.Ag.,M.Hum
Pembina Utama Muda /
NIP. 19691117 200112 1 002